BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi ini, banyak perusahaan yang menerapkan *corporate governance* untuk meminimalkan risiko bisnis yang mungkin terjadi. Peran *corporate governance* sebagai struktur dan mekanisme sistem dalam mendorong kepatuhan pengelolaan pembayaran pajak dinilai sangat diperlukan. Perusahaan yang telah menerapkan *corporate governance* yang baik diharapkan memiliki kinerja yang baik dan efisien. Dengan penerapan *corporate governance* dapat memberikan perlindungan yang efektif bagi para pemangku kepentingan. Penerapan prinsip-prinsip *corporate governance* dianggap suatu keharusan agar nilai perusahaan dapat terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan bisnisnya. Adanya sistem *corporate governance* yang baik juga dirasa perlu untuk membantu perusahaan dalam mewujudkan visi dan misi yang ingin dicapai (Khoiriyah, 2019).

Corporate governance memiliki peran dalam proses pengambilan keputusan termasuk keputusan perpajakan, namun di sisi lain perencanaan pajak bergantung pada dinamika *corporate governance* dalam suatu perusahaan (Winata, 2014). Ketika dinamika *corporate governance* tidak sesuai dengan tata kelola dan prinsip, serta tidak adanya pengawasan yang memadai, maka perusahaan dapat meminimalkan beban pajak yang harus dibayar. Pembayaran pajak penghasilan didasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh perusahaan. Perusahaan tentunya selalu menginginkan keuntungan yang besar, namun keuntungan yang besar akan dikenakan beban pajak yang besar pula (Rodhini, 2020).

Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar di Indonesia. Penerimaan pajak digunakan untuk mendanai berbagai fasilitas umum seperti kesehatan, pendidikan, pembangunan infrastruktur publik, dan lain-lain. Pemerintah (Fiskus) tentu mengharapkan wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan, ikut

serta membayar pajak untuk kesejahteraan negara. Namun berdasarkan data, realisasi penerimaan pajak tahun 2020 hanya sebesar Rp. 1.069,98 triliun. Angka tersebut meleset dari target yang ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan sebesar Rp. 1.198,82 triliun (Masdi, 2021). Pembayaran pajak dirasakan mengurangi pendapatan atau pendapatan wajib pajak, dan masyarakat tidak merasakan imbalannya secara langsung. Faktor inilah yang menjadi alasan wajib pajak melakukan perlawanan terhadap pajak (Okrayanti et al., 2017).

Rendahnya kepatuhan pajak di Indonesia merupakan salah satu indikasi terjadinya praktik *tax avoidance* (Rodhini, 2020). Sebenarnya ada cukup banyak praktik *tax avoidance* yang agresif di Indonesia. Pada tahun 2018, Kantor Pajak Penanaman Modal Asing (PMA) Dua Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menargetkan Rp 21,39 triliun dari PMA, namun hingga semester I 2018, realisasinya hanya 43% atau Rp 9,2 triliun (Ananti, 2018). Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan penanaman modal asing atau perusahaan multinasional di Indonesia yang sebagian besar memiliki nilai aset yang besar, melakukan tindakan *tax avoidance* dalam operasionalnya. Dalam penelitian Nugraheni & Pratomo (2018), tindakan *tax avoidance* akan meningkatkan keuntungan bagi perusahaan karena membayar pajak serendah mungkin, sedangkan *tax avoidance* dalam hal perpajakan dapat memberikan dampak yang cukup besar bagi negara meskipun tidak melanggar pajak peraturan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Direktorat Jenderal Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan, isu *tax avoidance* oleh perusahaan multinasional bukanlah hal baru. DJP telah mengidentifikasi ribuan investor asing yang diduga melakukan penggelapan pajak. Indikasi ini muncul karena, meski pemilik penanaman modal asing sudah puluhan tahun menjalankan usahanya, namun tidak pernah melaporkan keuntungannya (Suwiknyo, 2017). Kementerian Keuangan sendiri memiliki Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 213/PMK.03/2016 yang

mewajibkan perusahaan lokal yang terafiliasi dengan konglomerasi luar negeri untuk menyampaikan laporan per negara. Dalam konteks pemerintah Indonesia, berbagai regulasi telah dibuat untuk mencegah *tax avoidance*. Salah satu aturan tersebut, misalnya, untuk transfer pricing, yaitu penerapan prinsip keadilan dan praktik bisnis dalam transaksi antara wajib pajak dan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa (Peraturan Dirjen Pajak No. 32 Tahun 2011).

Tax avoidance merupakan upaya meringankan beban pajak dengan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang ada (Mardiasmo, 2018). Wajib pajak badan adalah badan usaha atau perusahaan yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan dan membayar pajak kepada pemerintah. Wajib pajak mencari cara agar pajak yang dibayarkan dapat dibuat sekecil mungkin tanpa melanggar peraturan yang berlaku tetapi tetap mempertahankan laba. Laba merupakan faktor terpenting dalam menentukan besarnya pembayaran tarif pajak efektif. Perusahaan membuat skema perencanaan untuk mengurangi pajak yang dibayarkan, yang berdampak langsung pada kinerja keuangan perusahaan.

Jacob (2014) mendefinisikan *tax avoidance* sebagai tindakan mengurangi atau meminimalkan kewajiban pajak dengan mengaturnya secara hati-hati sedemikian rupa sehingga celah dalam ketentuan perpajakan dimanfaatkan, seperti pemungutan pajak dengan transaksi yang bukan objek pajak. Misalnya, perusahaan yang mengubah imbalan kerja menjadi hadiah berupa uang bukan merupakan objek pajak dalam PPh Pasal 21.

Fenomena kasus *tax avoidance* marak terjadi di Indonesia, Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo menyebutkan soal temuan *tax avoidance* yang diperkirakan merugikan negara hingga Rp 68,7 triliun per tahun. Temuan yang diumumkan oleh *Tax Justice Network* melaporkan bahwa akibat *tax avoidance*, Indonesia diperkirakan merugi hingga US\$ 4,86 miliar per tahun. Angka ini setara dengan Rp. 68,7 triliun bila menggunakan kurs rupiah sebesar Rp.

Dicka Muhammad Nugraha, 2022
**PENGARUH KOMITE AUDIT DAN KEPEMILIKAN MANAJERIAL TERHADAP TAX AVOIDANCE
(SURVEI PADA PERUSAHAAN MULTINASIONAL DI INDONESIA YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE
2018-2020)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

14.149 per dolar Amerika Serikat (AS). Dalam laporan Tax Justice Network berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the Time of Covid-19*, disebutkan dari angka tersebut, sebanyak US\$ 4,78 miliar atau setara dengan Rp. 67,6 triliun di antaranya merupakan hasil penggelapan pajak badan di Indonesia. Sedangkan sisa US\$ 78,83 juta atau sekitar Rp 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi. Suryo mengatakan, untuk meminimalisir *tax avoidance*, pihaknya melakukan pengawasan terhadap transaksi yang melibatkan transaksi khusus. Tambahnya, biasanya *tax avoidance* muncul karena transaksi yang terjadi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa baik di dalam negeri maupun di luar negeri (Santoso, 2020).

Sampai saat ini penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* sudah banyak dilakukan, diantaranya *leverage* (Dewinta & Setiawan, 2016; Ariawan & Setiawan, 2017; Kalbuana et al., 2020), profitabilitas (Sari & Devi, 2018; Januari & Suardikha, 2019; Aulia & Mahpudin, 2021;), hingga *Good Corporate Governance*. Penelitian yang mengaitkan faktor *Good Corporate Governance* dengan *tax avoidance* juga telah dilakukan oleh para peneliti diantaranya (Diantari & Ulupui, 2016; Prasetyo & Pramuka, 2018; Ashari et al., 2020) dengan hasil yang berbeda-beda.

Fadhilah (2014) menyebutkan bahwa ada dua mekanisme dalam pengawasan *corporate governance*, yaitu internal dan eksternal. Mekanisme internal adalah cara pengendalian perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal seperti proporsi komisaris independen (Saputri, 2018; Yuniarti et al., 2020; Masrurroch et al., 2021), komite audit (Diantari & Ulupui, 2016; Ardianti, 2019; Triyanti et al., 2020) dan kepemilikan manajerial (Prasetyo & Pramuka, 2018; Putri & Lawita, 2019; Ashari et al., 2020). Penelitian ini akan lebih fokus pada faktor internal yaitu komite audit dan kepemilikan manajerial.

Komite audit dalam suatu perusahaan bertindak secara independen yang berfungsi untuk mengawasi kinerja dan standar keuangan perusahaan, dengan pengawasan yang baik perusahaan akan berusaha meminimalkan tindakan manajemen untuk menghindari pajak. Keberadaan komite audit diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengendalian internal yang pada akhirnya ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya (Ardianti, 2019).

Sejak direkomendasikannya *good corporate governance* di BEI pada tahun 2000, komite audit telah menjadi elemen bersama dalam bentuk struktur *corporate governance* publik, sehingga jika jumlah komite audit di suatu perusahaan tidak sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh BEI yang membutuhkan minimal tiga orang akan mengakibatkan tindakan manajemen dalam meminimalkan keuntungan untuk tujuan perpajakan (Pohan, 2008). Hasil penelitian Fadhilah (2014), Cahyono et al. (2016), dan Basuki (2019) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Namun berbeda dengan penelitian lain yang mengungkapkan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* (Diantari & Ulupui, 2016; Primasari, 2019; Triyanti et al., 2020).

Kepemilikan manajerial adalah proporsi yang dimiliki oleh manajemen yang diukur dengan penyajian saham biasa yang dimiliki oleh manajemen yang terlibat aktif dalam pengambilan keputusan suatu perusahaan (Prasetyo & Pramuka, 2018). Arifani (2012) menegaskan bahwa struktur kepemilikan saham manajerial diukur sebagai persentase saham biasa dan opsi saham yang dimiliki oleh direksi dan karyawan. Semakin besar saham manajerial dalam perusahaan, maka manajemen cenderung lebih tertarik pada pemegang saham karena jika terjadi keputusan yang salah, manajemen juga akan berdampak pada konsekuensinya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Anuar et al. (2014), Pramudito & Sari (2015), Mahulae et al. (2016), dan Mark & Thomas (2016) menyimpulkan bahwa kepemilikan manajerial

berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Namun Pohan (2008), Kurniaty (2016), Kim et al. (2016), dan Budiarti (2017) menyimpulkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Beberapa penelitian sebelumnya yang telah dilakukan memberikan hasil yang tidak konsisten sehingga penulis tertarik untuk mengangkat topik *tax avoidance* dengan menggunakan Komite Audit dan Kepemilikan Manajerial sebagai variabel independen. Penelitian ini akan berbeda dengan penelitian sebelumnya, dengan mengganti variabel dan menambah sampel diharapkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat menutupi keterbatasan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini menggunakan perusahaan multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai sampel. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Komite Audit dan Kepemilikan Manajerial Terhadap *Tax Avoidance* (Survei Pada Perusahaan Multinasional di Indonesia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan multinasional di Indonesia?
2. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan multinasional di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berikut ini adalah tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan multinasional di Indonesia.

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kualitas audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan multinasional di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Akademik

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh komite audit dan kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance*, sehingga diharapkan dapat memberikan dorongan untuk melakukan penelitian lebih baik dan melengkapi penelitian yang telah dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi ilmu akuntansi serta memberikan sumbangan konseptual bagi penelitian lainnya untuk kemajuan dunia pendidikan, secara khusus mengenai *tax avoidance*.

2. Praktisi

Sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan terkait dalam mengambil keputusan pengelolaan pajaknya. Sedangkan untuk pembaca diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance*.